

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan), yang dituangkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahunan dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perencanaan strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan agar sasaran dan program dapat dijalankan melalui kegiatan yang lebih terfokus dalam rangka pencapaian kinerja sasaran. Perencanaan Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan maka rencana kerja yang telah ditetapkan disampaikan dan dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang guna diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya ditetapkan dalam APBD Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 – 2021 yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang Unggul”

Rencana Kerja ini nantinya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selama tahun 2018.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang transparan. Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keterbukaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan Aparatur Sipil Negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga kebersihan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada pemerintah, masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor; 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD guna dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. Sedangkan tujuannya adalah agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menyelenggarakan program dan kegiatannya dengan mantap, terarah, terkoordinasi dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, sesuai target kinerja yang telah direncanakan dalam waktu satu tahun.

Penyusunan Renja juga dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta untuk menilai suatu keberhasilan pada bidang kepegawaian dalam waktu satu tahun.

Dengan demikian penyusunan Renja dimaksudkan dan bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman dan arah bagi pencapaian tujuan organisasi;
- b. Memberikan kejelasan terhadap kegiatan yang diprioritaskan;
- c. Memberikan tolak ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan;
- d. Memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi maupun informasi;
- e. Memberikan kemudahan sebagai alat koordinasi terhadap perencanaan-perencanaan lainnya;
- f. Memberikan kemudahan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian daerah sesuai Ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran dari rencana strategi (Renstra) 2015-2021 SKPD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam mengimplementasikan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017, ada 4 (empat) program yang telah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh BKD guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan masing-masing program tersebut direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan disahkan dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan pada setiap tahun anggaran.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan direalisasikan pada tahun 2017 sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan telah ditetapkan dalam renja BKD tahun 2017 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 1
Program dan Kegiatan BKD Tahun 2017

No	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA 2017	REALISASI	%
	Belanja Tidak Langsung	2.389.226.452	2.244.369.414	93.94
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.825.226.452	1.781.062.954	93.18
2	Tambahan Penghasilan PNS	564.000.000	451.100.000	96.39
	Belanja Langsung	4.150.214.950	3.296.357.256	79.43
	Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran	895.931.800	833.185.289	93.03
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.640.000	1.980.000	75.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.400.000	72.895.679	74.08
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.127.000	19.031.000	86.01
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	77.032.800	76.532.800	99.35
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.500.000	44.225.950	95.11
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.072.000	2.995.800	97.51
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	53.880.000	43.297.000	80.36
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	541.300.000	539.555.360	99.68
9	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	50.980.000	32.672.000	64.09
	Program Peningkatan Sarana	277.000.000	194.279.913	70.14

	dan Prasarana Aparatur			
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	160.000.000	125.749.000	78.59
11	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	45.000.000	10.264.000	22.81
12	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	45.000.000	31.361.913	69.69
13	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	27.000.000	26.9050.000	99.65
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>733.903.600</i>	<i>299.318.163</i>	<i>40.78</i>
15	Penyediaan Biaya Diklat Lainnya	50.750.000	0	0
16	Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Kepemimpinan	315.025.000	102.000.000	32.38
17	Bimbingan Teknis Manajemen Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	69.814.363	87.27
18	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian	85.499.300	64.291.000	75.19
19	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Revolusi Mental	131.916.000	0	0
20	Workshop Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Sesuai PP Nomor 46 tahun 2011	70.713.300	63.212.800	89.39
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.920.000	0	0
	Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RESTRA, RENJA	11.920.000	0	0
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.227.554.650	856.160.781	38.44

22	Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingk. Pemkab Humbang Hasundutan	90.000.000	67.134.000	74.59
23	Tim Koordinasi Penjatuhan Hukuman Disiplin	94.800.000	78.609.300	82.92
24	Proses Kenaikan Pangkat	161.674.200	127.490.000	78.86
25	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme (Baperjakat)	138.186.950	104.060.800	75.30
26	Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	75.000.000	8.807.000	11.74
27	Pemutahiran Data dan Penyusunan Profil Kepegawaian	90.162.000	0	0.00
28	Pengadaan CPNS	859.999.500	0	0.00
29	Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	368.606.000	275.245.481	74.67
30	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	121.383.000	0	0.00
31	Workshop Pembuatan/Penyusunan DUPAK/PAK bagi Tenaga Fungsional	128.729.000	105.850.000	82.23
32	Pelaksanaan Ujian Dinas ASN	99.014.000	88.964.200	89.85
TOTAL		6.535.536.502	4.427.313.560	67.85

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja fisik pada tahun 2017 sebesar 81.25 % dan realisasi keuangan sebesar 67.85 %.

Adapun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi dana belanja tidak langsung sebesar Rp.

2.389.226.452,- terealisasi sebesar Rp. 2.244.369.414,- dengan persentase 93.94 %.

B. Belanja Langsung

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp. . 4.150.214.950,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.296.357.256,- dengan persentase 79.43 %.

Program dan Kegiatan Tahun 2017 telah berjalan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
2. Jasa Tagihan Telepon, Listrik dan Air pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
3. Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
4. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
5. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
6. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
7. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Pegawai dan tamu pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
8. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan;
9. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah selama 12 bulan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

1. Tersedianya peralatan gedung kantor yaitu;
Fingerprint 1 unit, komputer PC 2 unit, printer 4 unit ,UPS 8 unit, Infokus 2 unit dan Gorden 1 Paket (37 pasang);
2. Terlaksananya perawatan gedung kantor BKD Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2;
4. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala selama 12 bulan.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

1. Pada Tahun 2017 kegiatan Penyediaan Biaya Diklat Lainnya tidak dilaksanakan karena tidak adanya undangan dari Badiklat secara resmi dan tidak ada OPD yang menyampaikan usul mengikuti diklat dimaksud;
2. Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Kepemimpinan III yang diikuti sebanyak 3 orang dari 3 OPD yaitu; Sekretaris BPMD 1 orang, Kepala Bidang Perpustakaan 1 orang dan 1 orang kepala bidang dari BKD yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bimbingan Teknis Manajemen Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang diikuti oleh 3 orang dilaksanakan di Yokyakarta, dan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Secara Akrual dan Penyusunan Anjab dan ABK yang diikuti oleh 4 orang bertempat di Bali dan Bintek mengenai Disiplin pegawai diikuti 2 orang dilaksanakan di Brastagi Sumatera Utara;
4. Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Bimtek Manajemen Kepegawaian yang diikuti oleh 70 orang yang dilaksanakan di Aula Hutamas dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Sebagai Narasumber adalah Bapak Westerling Siregar, SH selaku Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian di Kanreg VI Medan;
5. Tahun **2017** Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Workshop Pembuatan DUPAK/PAK Jabatan Fungsional Guru terdiri dari 100 orang peserta terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Humbang Hasundutan

yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 6 s.d. 8 Nopember 2017 dengan mendatangkan Narasumber dari Kantor Regional VI Medan yaitu Bapak Westerling Siregar, SH selaku Kabbid Mutasi dan Status Kepegawaian acara tersebut di buka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan bertempat di Aula hutamas;

6. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Revolusi Mental kegiatan ini tidak dilaksanakan.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RESTRA, RENJA pada Tahun 2017 terlaksana dengan baik.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Kegiatan ;

- Pada 2017 tidak ada ASN yang mengikuti Diklat Lainnya karna tidak ada OPD/Unit Kerja yang membuat Usul nama ASN untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Proses kenaikan pangkat ASN Periode 01 April 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Semester I Tahun Anggaran 2017 telah terlaksana, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada bulan Januari s/d Pebruari 2017 pada jam dan hari kerja yang bertempat di Bidang Pembinaan Karir dan Disiplin adapun jumlah ASN yang naik Pangkat Periode 01 April 2017 yaitu sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) orang dengan rincian :
 - Tenaga Struktural : Golongan IV sebanyak 11 orang, Golongan III sebanyak 29 orang, Golongan II sebanyak 93 orang dan Golongan I Sebanyak 16 orang.
 - Tenaga Fungsional Tertentu: Golongan IV sebanyak 76 orang, Golongan III sebanyak 54 orang, dan Golongan II sebanyak 6 orang.
 - Tenaga Kesehatan Gol IV Tidak ada Golongan III sebanyak 6 orang, Golongan II sebanyak 1 orang Golongan I tidak ada dan tenaga Penyuluh golongan III sebanyak 3 orang.
- Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengajukan kenaikan pangkat untuk periode 01 Oktober 2017 sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh Sembilan) orang dengan keterangan sebagai berikut:

- Tenaga Struktural sebanyak 166 yaitu: Golongan IV sebanyak 12 orang, Golongan III sebanyak 76 orang, Golongan II sebanyak 75 orang dan Golongan I Sebanyak 7 orang.
 - Tenaga Fungsional (Guru/pengawas) sebanyak 402 yaitu : Golongan IV sebanyak 36 orang, Golongan III sebanyak 269 orang, dan Golongan II sebanyak 97 orang.
 - Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 18 orang yaitu Golongan III sebanyak 5 orang, dan Golongan II sebanyak 13 orang.
 - Jabatan Fungsional Penyuluh Golongan III sebanyak 3 orang;
- Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Workshop Pembuatan DUPAK/PAK Jabatan Fungsional Guru terdiri dari 100 orang peserta terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 06 s.d. 08 Nopember 2017 dengan mendatangkan Narasumber dari Kantor Regional VI Medan yaitu Bapak Westerling Siregar, SH selaku Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian acara tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan bertempat di Aula hutamas;
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Ujian Dinas Tk. I (II.d ke III.a) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, yang lulus 40 orang dan yang tidak lulus 7 orang Ujian Dinas Tk. II (III.d ke IV. a) sebanyak 7 orang dan lulus sebanyak 7 orang dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan April dan tim pengawasnya terdiri dari ibu Renyasari, SH Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Kanreg VI Medan, Edward Sianturi, SE, Analis Kepegawaian Madya pada Kanreg VI Medan serta Ibu Jojor Onom Hutasoit, S. Sos., M.A Analis Kinerja Pada Kanreg VI BKN Medan dan pelaksanaannya dilaksanakan di SD Negeri 173396 Doloksanggul dan SD lain yang ada di sekitar BKD.
- Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Bimtek Manajemen Kepegawaian yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang yang dilaksanakan di Aula Hutamas dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Sebagai Narasumber adalah Bapak Westerling Siregar, SH selaku Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian di Kanreg VI Medan.
- Tahun 2017 juga melaksanakan Workshop Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011 yang di ikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta yang dihadiri oleh Kasubbag Umum dan Sekretaris dari OPD/Unit Kerja yang ada di

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Narasumber dalam acara itu adalah Bapak Westerling Siregar, SH selaku Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian di BKN Kanreg VI Medan.

- Tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS serta Pembentukan Tim Koordinasi Penjatuhan Hukuman Disiplin yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal banding Administratif dan pembentukan Tim Pemeriksa sehingga Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat Sedang dan Berat dapat dilaksanakan secara obyektif dan prosedural.

- Untuk Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan penyerahan tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya untuk yang ke X (sepuluh), XX (dua puluh) dan XXX (tiga puluh) yang berjumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) orang dengan perincian sebagai berikut:

- X sebanyak 135 orang;
- XX sebanyak 128 orang;
- Dan yang ke XXX sebanyak 163 orang.

Penyerahan tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya tersebut dilaksanakan pada 17 Agustus 2017 yang diserahkan langsung oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang bertempat di Lapangan Merdeka Doloksanggul.

- Pengambilan Sumpah/Janji PNS Tahun **2016** terhadap CPNS yang baru diangkat menjadi PNS, PNS yang belum pernah diambil sumpahnya atau PNS yang baru pindah ke Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum diambil sumpah PNS sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan pada tahun **2017** sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang yang dilaksanakan pada bulan April.

- Untuk tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki data Mutasi Masuk dan Keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Mutasi masuk 11 orang antara lain:
 - Pejabat Struktural : 5 orang
 - Pejabat Fungsional : 6 orang

- Mutasi keluar 25 orang antara lain:
 - Pejabat Struktural : 17 orang
 - Pejabat Fungsional : 9 orang

- Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan lewat TIM BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang terdiri dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berjumlah 3 orang dan Tim Sekretariat berjumlah 12 orang bertugas untuk membahas dan mempersiapkan bahan Baperjakat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan Baperjakat tersebut adalah :
- Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/002/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 hal Pengangkatan kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/5240/BKD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 hal Pengangkatan dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 7 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/1020/BKD/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 hal Pengangkatan dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 131 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/5406/BKD/2017 tanggal 29 Nopember 2017 hal Pengangkatan dan mutasi Pejabat Administrator sebanyak 14 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/3895/BKD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 hal Pengangkatan kembali/pengukuhan dari dan dalam Jabatan Administrator dan pengawas selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi/kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebanyak 11 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/2685/BKD/2017 tanggal 17 Mei 2017 dalam Jabatan Administrator sebanyak 6 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/1262/BKD/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 Pengangkatan dan mutasi pejabat Pengawas sebanyak 223 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/2686/BKD/2017 tanggal 17 Mei 2017 Pengkatan dan mutasi pejabat pengawas sebanyak 56 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/1952/BKD/2017 tanggal 10 April 2017 Pengkatan dan mutasi pejabat pengawas kecamatan 48 orang;
 - Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/5407/BKD/2017 tanggal 10 April 2017 Pengkatan dan mutasi Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 19 orang;

- Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/3985/BKD/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Pengkatan dan mutasi Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebanyak 118 orang.
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) dimana Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah Saul Situmorang, SE., M.Si sebagai Ketua, Drs.Rudolf Manalu sebagai Wakil Ketua dan Ibu Prof DR. Irmawati Soeprapto, Psikolog Jabatan Guru Besar Fakultas Psikologi USU sebagai Ketua Tim Asesor dan pelamar yang mendaftar mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 17 orang dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti tahapan Kompetensi dan tahapan Psikotes serta pelaksanaan tahapan seleksi Wawancara yang meliputi penjadwalan, materi dan tata cara penulisan karya tulis, usia maksimal mengikuti seleksi adalah 56 tahun sesuai PP nomor 11 Tahun 2017 dan yang lolos Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebanyak 7 orang dan telah dilantik untuk menduduki jabatan yang di Seleksi.

Hal-hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi sebagai-berikut ;

1. Masih ada PNS yang belum diambil sumpah/janji sebagai PNS yang belum diangkat jadi PNS dan PNS yang baru pindah ke Kabupaten Humbang Hasundutan belum diambil sumpah/janji PNS;
2. Masih ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak menaati ketentuan jam kerja;
3. Seringnya keterlambatan penyampaian berkas dari PNS yang akan naik pangkat ke kantor BKD Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai tanggal yang ditetapkan pada surat edaran sehingga proses pemberkasan sering terlambat diproses yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman berkas ke BKD Propinsi Sumatera Utara dan BKN Regional VI Medan sehingga proses naik pangkat tidak dapat diproses tepat waktu;
4. Para Pimpinan SKPD/Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman belum sepenuhnya memahami ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
5. Masih ada PNS yang belum memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

6. Masih ada beberapa Jabatan yang lowong atau belum terisi pada beberapa SKPD;
7. Masih ada beberapa SKPD yang menyerahkan daftar urut kepangkatan tanpa keterangan yang jelas serta tidak mengirimkan format kartu indentitas pegawai yang telah didistribusikan oleh BKD Kab. Humbang Hasundutan;
8. Distribusi pegawai pada organisasi perangkat daerah belum maksimal;
9. Jumlah pegawai secara keseluruhan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terbatas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKD Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah menghendaki adanya pembaharuan atau perubahan strategis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perubahan dibidang kepegawaian difokuskan pada pengembangan masalah sumber daya aparatur, mulai dari masalah perencanaan, rekrutmen dan seleksi pegawai, kinerja aparatur maupun masalah karir dan kesejahteraan serta disiplin aparatur.

Untuk mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemerintah Daerah. Pengembangan sumber daya aparatur tersebut diarahkan kepada aktualitas peningkatan pemberian pelayanan prima baik kepada PNS sebagai penyelenggara roda pemerintahan maupun kepada masyarakat serta peningkatan kualitas/ profesionalisme dan disiplin SDA (PNS) itu sendiri dalam rangka mewujudkan good governance.

Untuk peningkatan kualitas dan profesional SDA dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada aparatur untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang program S1, S2 atau S3, mengikuti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mentalitas dan perilaku SDM aparatur melalui pelatihan mengenai pembangunan karakter (character building).

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian yang semakin cepat, tepat, valid, efektif dan efisien, baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat, maka sistem pelayanan kepegawaian sudah harus di arahkan kepada penggunaan teknologi informasi yang dapat diterapkan pada penggunaan program SIMPEG dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini SIMPEG. Dengan SIMPEG, dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum Meratanya Kompetensi Aparatur;

2. Belum Terdistribusinya Aparatur secara Profesional;
3. Belum Tertatanya Dokumen Kepegawaian Setiap Aparatur;
4. Pelayanan Kepegawaian masih Konservatif/tradisional;
5. Belum Terbentuknya Polarisasi Karir;
6. Belum Terbinanya Hubungan Sinergitas antara Pejabat Pengelola SKPD dengan BKD;
7. Pola Pengelolaan Kepegawaian SKPD masih Impersonal (pribadi);
8. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Diklat Fungsional dan Struktural;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka telah disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terdapat di dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan tersebut dalam renstra SKPD, selain didasarkan pada kebutuhan pegawai juga didasarkan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan/diatur dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam rancangan awal RKPD melalui forum SKPD dan Musrenbang, sehingga tidak ada jenis program dan kegiatan yang baru/berbeda. Adanya perbedaan dari jumlah anggaran yang diusulkan dan yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di bidang kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dalam program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, penetapan program dan kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, hanya mengacu pada program dan kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dalam bidang kepegawaian melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari para Pemangku Kepentingan, seperti LSM, asosiasi-asosiasi, ataupun Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Dalam mencapai Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 – 2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Budaya Kepegawaian yang Unggul;
2. Membangun Budaya Pelayanan Kepegawaian yang tulus dan ikhlas;

3. Mewujudkan Dokumen Kepegawaian yang Akurat;
4. Mewujudkan Tata Kepegawaian yang Harmonis dan Akurat;
5. Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian yang Cepat, Tepat, Mudah dan Terhormat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam bidang kepegawaian meliputi Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai, pengangkatan dan penggajian, pengembangan, pemberhentian, dan pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan Bupati. Sesuai dengan Visi Misi Bupati Humbang Hasundutan yaitu misi yang ke tiga yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik” yang diselaraskan dengan Visi Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu;

“ Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang Unggul “

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang membantu Bupati dalam bidang kepegawaian meliputi bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengangkatan dan penggajian, pengembangan, pemberhentian, dan pensiun pegawai membuat program dan rencana kegiatan.

Guna mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang hebat dan bermentalitas unggul Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan menyelenggarakan pemerintahan yang kuat , berwibawa, bermartabat, hebat dan berhasil serta babas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Adapun strategi-strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan tersusunnya struktur kelembagaan pemerintahan yang kuat efisien yang berorientasi kepada pelayanan publik;

2. Peningkatan kualitas Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keahlian masing-masing dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penataan SDM aparatur yang kompeten, proporsional dan professional;
3. Peningkatan kualitas perencanaan berdasarkan politik, teknokratis, partisipatif, top down, bootom up dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dengan memperhatikan penuh kearifan lokal, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas ASN melalui peningkatan jenjang Pendidikan, Diklat;
4. Peningkatan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan ASN/ Masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dengan arah kebijakan pelaksanaan kajian jabatan (job analisis) untuk membuat keterangan jabatan (job description) dan persyaratan jabatan (job specification) dan menggunakannya untuk penempatan kembali pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi dengan berpedoman dengan peraturan pemerintah;
5. Peningkatan penguatan kelembagaan dan kemampuan aparatur pemerintahan dengan arah kebijakan melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran, meningkatkan kinerja ASN melalui pemantapan regulasi dan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen keuangan, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan e-Government meliputi e, Office, e-Planning dan e-budgeting, mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sasaran :
 1. Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan formal;
 2. Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis ketrampilan dan atau keahlian
 3. Terwujudnya peningkatan etos kerja dan karier aparatur pemerintah daerah melalui pembinaan karier/promosi jabatan;
 4. Adanya penempatan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
 5. Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;

6. Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah daerah melalui penegakan disiplin aparatur pemerintah daerah dan penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin pegawai.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program

Secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Adapun Program Renja BKD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

4.2. Kegiatan

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BKD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - d. Pengadaan alat tulis kantor;
 - e. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - g. Penyediaan makanan dan minuman;
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
 - i. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah;
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a. Pengadaan alat angkutan darat kendaraan dinas roda dua;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan biaya diklat lainnya;
 - b. Pengiriman diklat prajabatan CPNS Gol. II ;
 - c. Pengiriman diklat prajabatan CPNS Gol. III;
 - d. Pengiriman PNS mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II, III dan IV;
 - e. Bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya aparatur BKD;
 - f. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar;
 - g. Diklat teknis manajemen kepegawaian PP 11 Tahun 2017 (lanjutan);
 - h. Diklat teknis revolusi mental;
 - i. Pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - j. Pelaksanaan ujian dinas;
 - k. Sosialisasi pembinaan dan penegakan disiplin PNS;
 - l. Workshop penyusunan penilaian prestasi kerja sesuai PP 46 Tahun 2011.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan :
 - a. Pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Tim koordinasi penjatuhan hukuman disiplin PNS daerah;
 - c. Proses kenaikan pangkat;
 - d. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme (Baperjakat);
 - e. Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator;
 - f. Pelaksanaan SAPK, penyusunan profil kepegawaian dan SIMPEG
 - g. Pengadaan CPNSD daerah
 - h. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
 - i. Proses pengusulan dan penerbitan , KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN bagi PNS

- j. Workshop pembuatan/penyusunan DUPAK/PAK bagi tenaga fungsional pendidikan
- k. Proses administrasi pensiun dan penghargaan purnabakti ASN
- l. Penyusunan standard dan pelaksanaan kompetensi jabatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2018 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk 2018.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2018 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian

tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan akan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun Anggaran 2018, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018, sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun 2018 yang didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2011-2021. Mudah mudahan apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Doloksanggul, Maret 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DOMU LUMBAN GAOL
PEMBINA
NIP. 19630303 198603 1 021

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN 2020
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
SETELAH PENYELARASAN

Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<i>Kode</i>													
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (Jumlah)		100%	858,046,929			943,851,622					
4	05	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)	BKD	3	33,793,000	DAU		3	37,172,300
4	05	1	01	07	Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	BKD	6	30,600,000	DAU		6	33,660,000
4	05	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Item)	BKD	29	34,276,500	DAU		29	37,704,150
4	05	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item)	BKD	49	64,505,029	DAU		49	70,955,532
4	05	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi (item)	BKD	4	33,734,900	DAU		4	37,108,390
4	05	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (item)	BKD	4	4,939,900	DAU		4	5,433,890

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	05	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang - undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)	BKD	1	29,856,600	DAU		1	32,842,260
4	05	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi (kebutuhan)	BKD	2	37,701,000	DAU		2	41,471,100
4	05	1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi (kali)	BKD	80	508,640,000	DAU		80	559,504,000
4	05	1	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi (kali)	BKD	200	80,000,000	DAU		200	88,000,000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (item)		100%	248,928,177				273,820,995
4	05	1	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua (item)	BKD	3 Unit	69,525,577	DAU		3 Unit	76,478,135
4	05	1	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (item)	BKD	5 item	99,172,600	DAU		5 item	109,089,860
4	05	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	BKD	100%	20,000,000	DAU		100%	22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	05	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas (Mobil) yang terpelihara (unit)	BKD	2 unit	40,360,000	DAU		2 unit	44,396,000
4	05	1	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung/kantor (item)	BKD	8 item	19,870,000	DAU		8 item	21,857,000
					Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (Persentase)		100%	663,077,000			729,384,700	
4	05	1	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV	Luar Kab. Humbang Hasundutan	8 org	314,994,000	DAU		10 org	346,493,400
4	05	1	16	03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	Luar Kab. Humbang Hasundutan	15 org	150,000,000	DAU		20 org	165,000,000
4	05	1	16	05	Bimbingan Teknis Pembinaan dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Pembinaan dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin	Kabupaten Humbang Hasundutan	70 org	58,391,000	DAU		70 org	64,230,100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	05	1	16	06	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Kabupaten Humbang Hasundutan	150 org	74,939,000	DAU		200 org	82,432,900
4	05	1	16	07	Pelaksanaan Ujian Dinas	Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas	Kabupaten Humbang Hasundutan	80 org	64,753,000	DAU		90 org	71,228,300
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur (%)		100%	2,112,171,056			2,323,388,162	
4	05	1	17	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah CPNS yang memenuhi Standar Kualifikasi yang dibutuhkan	Kabupaten Humbang Hasundutan.	200 org	625,084,200	DAU		200 org	687,592,620
4	05	1	17	09	Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin	BKD	100%	112,874,000	DAU		100%	124,161,400
4	05	1	17	17	Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah PNS yang Naik Pangkat pada tahun berjalan	BKD	1500 org	119,344,446	DAU		1500 org	131,278,891
4	05	1	17	18	Operasional Tim Baperjakat	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	BKD	100%	99,287,110	DAU		100%	109,215,821
4	05	1	17	19	Update data PNS dan Penyusunan Buku Profil Kepegawaian Kabupaten Humbang Hasundutan	Jumlah data PNS yang telah di update	BKD	4 Paket	69,910,500	DAU		4 Paket	76,901,550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000.)				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	05	1	17	20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian tentang pensiun PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian tentang pensiun PNS	BKD	70 org	57,999,800	DAU		70 org	63,799,780
4	05	1	17	21	Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian	Jumlah Aparatur yang mengikuti Penerapan e-Kepegawaian (e-SIMPEG,e Absensi dan e- Kinerja)	BKD	70 org	108,195,000	DAU		70 org	119,014,500
4	05	1	17	22	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Persentase Pejabat ditempatkan sesuai kompetensi	BKD	100%	919,476,000	DAU		100%	1,011,423,600
Jumlah									3,882,223,162				4,270,445,478

Doloksanggul, 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DOMU LUMBAN GAOL, S.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19630303 198603 1 021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>